

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara mengakses dan menyebarkan informasi. Di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi katalisator utama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Akses internet yang semakin meluas serta maraknya penggunaan perangkat seluler telah menciptakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap keterbukaan informasi. Masyarakat kini dapat dengan mudah memperoleh, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait kebijakan publik, anggaran pemerintah, hingga kinerja pejabat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini tercermin dalam adopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi di Indonesia telah membawa sejumlah manfaat signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertama, dengan adanya akses yang mudah terhadap informasi publik, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang bermanfaat, mengawasi penggunaan anggaran negara, serta menuntut akuntabilitas para pejabat publik. Kedua, keterbukaan informasi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat memberikan kontribusi ide dan gagasan dalam penyusunan kebijakan publik melalui berbagai saluran. Partisipasi aktif masyarakat ini dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih relevan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ketiga, keterbukaan informasi dapat membantu dalam melawan korupsi dan praktik-praktik buruk lainnya. Dengan adanya pengawasan publik, pejabat pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan, karena masyarakat dapat mengetahui hubungan antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta maupun pihak-pihak lainnya.

Sejalan dengan tren global, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka melalui inisiatif seperti *Open Government* Indonesia (OGI). Menurut Bappenas (dalam Sofiana, 2023: 46) *Open Government* Indonesia merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor



sasikan tiga pilar utama, yaitu transparansi, partisipasi publik, dan diwujudkan melalui ketersediaan data dan informasi publik dan dipahami oleh masyarakat. Partisipasi publik melibatkan aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap evaluasi. Sementara itu, inovasi mendorong penggunaan katan baru dalam penyampaian layanan publik. Hal tersebut

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan tiga pilar keterbukaan pemerintah, yakni transparansi, partisipasi publik, dan inovasi.

Sejak awal diperkenalkan konsep *open government* atau pemerintahan terbuka telah mengalami transformasi yang signifikan. Banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi praktik ini, yang awalnya hanya sekedar gagasan abstrak kemudian menjelma menjadi praktik nyata. Hal tersebut menandai adanya pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan dimana transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas menjadi pilar utama (Afandi, 2024:9). Indonesia juga ikut serta menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif, langkah awal ini menjadi tonggak sejarah bangsa untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan membuka akses terhadap informasi publik, pemerintah tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahun 2011, komitmen Indonesia terhadap *open government* semakin nyata dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *Open Government Partnership* (OGP). Melalui forum multilateral ini, Indonesia tidak hanya belajar dari praktik terbaik negara lain, tetapi juga berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mendorong adopsi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di seluruh dunia. Dengan forum ini, negara berkomitmen untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik (Sari & Nawangsari, 2019: 87). Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana memberdayakan masyarakat untuk menjadi pengawas aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini bukan hanya sebatas regulasi, melainkan sebuah komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Setiap warga negara kini memiliki alat yang ampuh untuk menuntut akuntabilitas dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan, sebagai daerah terbilang masih timpang. Beberapa daerah telah membuka informasi, namun banyak daerah lain yang masih belum. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam



pemenuhan hak asasi manusia, karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang.

Salah satu ciri dari pemerintahan yang baik adalah mewujudkan pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka yang efektif tidak dapat terwujud tanpa adanya petugas pelayanan informasi publik yang kompeten dan responsif. Keberadaan petugas pelayanan informasi publik di setiap lembaga menjadi kunci dalam memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang undang ini, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik agar tujuan undang undang tersebut dapat tercapai (Ulaan, dkk., 2022: 2).

Penerapan dari undang-undang tersebut tidak secara baik mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, dan hal tersebut juga diakui oleh Pemerintah Indonesia secara langsung. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah, yang dapat dirasakan dengan tidak adanya portal bebas yang dapat diakses oleh masyarakat sendiri (Khithobi, dkk., 2024: 53). Selain itu berdasarkan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2023-2024 dikatakan bahwa, Permasalahan-permasalahan yang ada terkait keterbukaan informasi publik, antara lain disebabkan oleh beberapa hal yakni: Pertama, kurangnya transparansi informasi pemerintah, khususnya informasi yang penting dan dapat digunakan. Meskipun Indonesia telah menggunakan secara elektronik, namun masih banyak informasi yang belum dipublikasi. Kedua, masih ada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menganggap bahwa informasi tidak harus diketahui oleh publik. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut memantau proses penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan proses penyelenggaraan yang kompleks sehingga sulit bagi masyarakat awam untuk melakukan pemantauan. Oleh karenanya, apabila ingin meningkatkan peran pengawasan masyarakat, maka dibutuhkan pula peningkatan kapasitas bagi masyarakat sebelum melakukan pemantauan.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi besar dalam menerapkan prinsip-prinsip *open government*. Keterbukaan informasi publik saat ini yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengamanatkan setiap badan publik dan perangkat daerah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan pejabat yang di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, informasi di perangkat daerah. Saat ini Pemerintah Kota Makassar memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di setiap perangkat daerah dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar memiliki PPID Utama (Waskito, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wira Waskito (2024), pelayanan informasi publik yang disediakan oleh PPID khususnya kepada masyarakat Kota Makassar, masih jauh dari kata optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Ruang pelayanan PPID yang terintegrasi dengan bidang lain seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemohon informasi. Kurangnya privasi dan fokus dalam pelayanan menjadi permasalahan. Selain itu, fasilitas penunjang seperti ruang tunggu yang nyaman dengan kursi yang cukup juga belum tersedia, sehingga masyarakat harus menunggu dalam kondisi yang kurang memadai. Selain itu, masalah teknis juga menjadi hambatan signifikan dalam pelayanan PPID. Portal website yang sering mengalami *error* dan *maintenance* mengganggu akses masyarakat terhadap informasi. Responsivitas PPID juga terkendala oleh kurangnya koordinasi antara PPID Utama selaku Dinas Komunikasi dan Informatika, dan PPID Pelaksana di perangkat daerah. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyediaan informasi dan ketidakpuasan masyarakat.

Penerapan *Open Government* di Kota Makassar, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ujung tombak dalam pengelolaan informasi publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya, penerapan *Open Government* di berbagai daerah, termasuk Kota Makassar, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, hingga resistensi dari pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2023 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dari hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Berdasarkan 6 indikator penilaian pengisian Kuesioner, dipadu dengan Inovasi, Kolaborasi dan Komitmen yang telah dilakukan badan publik terkait pelayanan informasi publik saat presentasi, di tahun 2023 badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang meraih kategori Informatif hanya 1 Badan Publik, 5 Badan Publik Menuju Informatif, 5 Badan Publik Cukup Informatif, dan 12 Badan Publik yang Tidak Informatif. Kota Makassar mendapat nilai Monev sebesar 80,98, dengan kategori menuju informatif. Nilai tersebut mendapatkan prestasi naik satu level dari tahun-tahun sebelumnya. Namun nilai tersebut masih harus terus ditingkatkan sampai level tertinggi. Dalam upaya peningkatannya, Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur meminta sinergi dari PPID setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat meningkatkan nilai. Langkah-langkah yang diusulkan antara lain sarana, seperti Ruang Layanan dan Meja Layanan khusus lain itu, mengumumkan dan mempublikasikan informasi publik utama dan *website* resmi Perangkat Daerah, serta menyiapkan



Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap PPID SKPD (Humas Kominfo Makassar, 2023).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi gambaran peneliti tentang Penerapan *Open Government* yaitu "Implementasi *Open Government* melalui Partisipasi Masyarakat pada Formulasi Kebijakan (Studi pada RAPERDA Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung)" (Wahyudi, 2021); Analisis *Open Government* dalam Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru" (Rani Gusfira Zulfa, 2023); dan "Analisis Implementasi *Open Government* Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik" (Analia Sofiana, 2023). Berikut penelitian terdahulu dijelaskan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Wahyudi (2021) "Implementasi <i>Open Government</i> melalui Partisipasi Masyarakat pada Formulasi Kebijakan (Studi pada RAPERDA Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung)"	Berkokus pada implementasi <i>open government</i> melalui partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan <i>open government</i> dalam hal ini partisipasi masyarakat dengan baik Namun, untuk aktor yang berpartisipasi sendiri masih terbatas karena dalam proses pembahasan, hanya aktor yang diundang yang boleh ikut membahas Raperda Penyelenggaraan Pesantren.
Rani Gusfira Zulfa (2023) "Analisis <i>Open Government</i> dalam Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru"	Berkokus pada <i>open government</i> dalam Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan <i>open government</i> pada Disdukcapil Kota Pekanbaru telah terlaksana secara baik, namun masih terdapat kendala dalam teknologi, informasi dan komunikasi.
Analia Sofiana (2023) "Analisis Implementasi <i>Open Government</i> Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon dalam Penyebarluasan Informasi Publik"	Berkokus pada implementasi <i>open government</i> melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) pada fitur Jak-Respon dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Jakarta kini (Jaki) Dari segi transparansi dari tindakan pemerintah, Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sudah terbuka secara default.



Penyebarluasan Informasi Publik”	penyebarluasan informasi publik	
----------------------------------	---------------------------------	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian mengenai Penerapan *Open Government* dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memiliki persamaan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas terkait *open government*, namun terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada Penerapan *Open Government* dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, dengan berdasar terhadap teori Wirtz dan Birkmeyer (2015: 9) yang mengatakan bahwa terdapat 3 tindakan pemerintah dan administrasi dalam mewujudkan *open government* yaitu, transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Fokus pada wilayah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam Penerapan *Open Government* di Kota Makassar khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

Bagaimana Penerapan *Open Government* dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar?

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PENERAPAN *OPEN GOVERNMENT* DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR”**.

I.2 Tinjauan Teori

Teori-teori yang dikemukakan para ahli mengenai keterbukaan pemerintah (*open government*) memberikan kerangka kerja untuk mengetahui bagaimana dinamika hubungan pemerintah yang baik dengan para masyarakat. Perkembangan demokrasi di berbagai negara mendorong tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Revolusi digital telah membuat akses informasi yang lebih mudah dan cepat, mendorong tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kemunculan teori ini didorong oleh perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, dan perubahan lanskap pemerintahan global. Teori *open government* menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis fenomena pemerintahan terbuka, serta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi akan publik.



Informasi merupakan pilar demokrasi dan merupakan bagian dari Setiap individu berhak untuk mengetahui, memahami, dan yang relevan dengan kehidupannya. Informasi adalah kunci an diri, mengambil keputusan yang tepat, dan berpartisipasi akat. Menurut Niklas Luhman, komunikasi melibatkan tiga

komponen utama: informasi, ekspresi, dan pemahaman. Dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi, ketiga komponen ini menjadi relevan dalam menunjukkan sejauh mana suatu organisasi bersedia berkomunikasi dengan pihak luar dan memenuhi tuntutan keterbukaan (Seidl & Becker, 2005).

Keterbukaan informasi publik adalah manifestasi dari hak asasi manusia atas informasi, yang memberikan setiap warga negara hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang dipegang oleh lembaga publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 Ayat 2).

Keterbukaan informasi publik menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Dengan kata lain, keterbukaan informasi publik adalah investasi jangka panjang untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pemerintah akan termotivasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif.

Informasi yang beredar di ruang publik berperan sebagai landasan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan, sesuai dengan teori Jurgen Habermas, yang menggambarkan ruang publik sebagai arena sosial tempat terbentuknya opini publik. Akses ke ruang publik harus inklusif bagi semua orang. Sebagian besar ruang publik terbentuk melalui percakapan di mana individu-individu berkumpul untuk membentuk opini publik. Namun, untuk mempengaruhi pandangan publik yang lebih luas, diperlukan sarana untuk menyebarkan informasi. Immanuel Kant mendefinisikan "publik" sebagai entitas yang menghargai kebebasan berpikir dan keberanian untuk menyuarakan ide-ide terbuka kepada masyarakat. Dalam konteks pengungkapan informasi publik, ide ini mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki kebebasan untuk berpikir tentang informasi (Kadir, dkk., 2022). Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kebebasan warga negara untuk mengakses informasi publik, sehingga memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam pemerintahan.



aktif warga negara dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya asasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pemerintahan. Dengan cepat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat an yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "*demos*" berarti

"rakyat" dan "*kratos*" berarti "kekuatan" atau "pemerintahan". Jadi, dapat diartikan bahwa demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau rakyatlah yang berkuasa. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, segala bentuk kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat (Arifin dalam Ferdaus & Zaimasuri, 2023). Inti dari demokrasi adalah memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. *Good governance* menjadi manifestasi dari demokrasi yang sejati, di mana setiap keputusan dan kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat dan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Singkatnya, tata kelola yang baik menekankan pentingnya tata kelola inklusif sebagai salah satu fondasinya. Dalam konteks ini, kebebasan untuk memperoleh informasi (akses publik terhadap informasi) dianggap sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk mewujudkan *open government*.

Pemerintahan terbuka (*open government*) adalah konsep dimana pemerintah menjalankan segala aktivitasnya secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan membuka akses publik terhadap informasi pemerintah, masyarakat dapat mengawasi setiap langkah pemerintah, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan (Agustina, Valeriani, & Yunita, 2021). Dalam konteks Indonesia, hak atas informasi telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi: "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia. Menurut Santosa dalam Ferdaus & Zaimasuri, 2023) Pemerintahan terbuka membutuhkan jaminan pada lima aspek, yaitu:

- 1) Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam melaksanakan tugas publiknya;
- 2) Hak untuk memperoleh informasi;
- 3) Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik;
- 4) Kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers;
- 5) Hak untuk mengajukan keberatan jika hak-hak sebelumnya ditolak.

Literatur tentang pemerintahan terbuka sebagian besar berasal dari Arahan Pemerintah Terbuka Obama tahun 2009 (Thorhildur, dkk., 2013: 5). Obama berfokus pada tiga gagasan utama mengenai bagaimana pemerintahan terbuka seharusnya bekerja. Pertama, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,



menjamin keterbukaan informasi publik sehingga warga negara dapat mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan serta memastikan kebijakan berjalan. Kedua, Pemerintah perlu menciptakan ruang yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan serta meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

Ketiga, Pemerintah harus menjalin kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Departemen dan lembaga eksekutif harus secara aktif membangun jaringan kerja atau kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah dapat menciptakan ekosistem kolaborasi yang memungkinkan pertukaran data, informasi, dan sumber daya secara efektif dan efisien (Obama, 2009).

Sejalan dengan itu, Wirtz & Birkmeyer (2015: 9) mendefinisikan *Open Government* adalah Bentuk multilateral, sosial dan poliitik, yang bertujuan mengintegrasikan warga negara dan masyarakat kelompok untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan pemerintahan dan administratif yang mencakup khususnya tindakan transparan, partisipatif serta kolaboratif oleh administrasi dan pemerintah. Ketiga tindakan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Transparansi

Transparansi merupakan pilar penting dalam pemerintahan terbuka. Hal mendasar dari proses transparansi adalah untuk memastikan adanya akses publik terhadap informasi yang tersedia. Publikasi informasi yang tepat waktu merupakan komponen penting transparansi. Transparansi adalah sebuah proses yang dapat terjadi karena adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah, media dan swasta untuk pengambilan keputusan yang terbuka. Sehingga transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam mengukur indikator transparansi ini merujuk pada adanya publikasi dan akses yang tepat terhadap informasi, hal ini bertujuan untuk melihat apakah badan publik melakukan proses publikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat mengenai informasi publik.

2) Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan melalui diskusi dan musyawarah. Dengan partisipasi mendorong keterlibatan publik yang dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kinerja pemerintah dan dapat memberikan pemerintah dengan berbagai pengetahuan maupun ide ide dari sisi masyarakat. Dalam mengukur indikator partisipasi ini merujuk pada adanya partisipasi masyarakat, hal ini bertujuan untuk melihat apakah badan publik membuka ruang terhadap permintaan dan kebutuhan masyarakat.

3) Kolaborasi

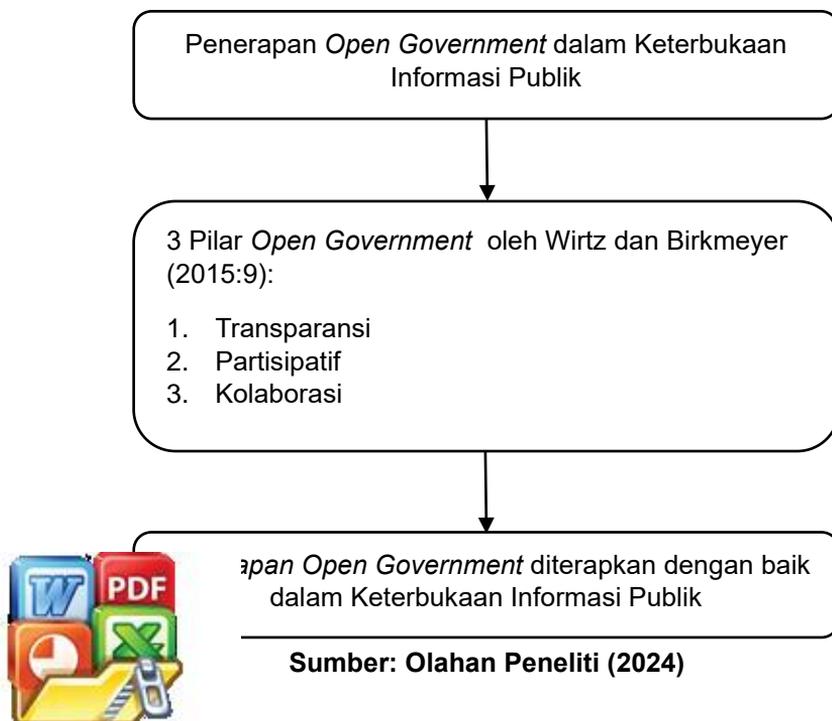


ra sederhana, kolaborasi adalah proses kerja sama antara dua bih, atau bahkan antar kelompok atau organisasi. Kolaborasi ini melibatkan warga dalam proses kinerja pemerintahan. arus menggunakan sistem inovatif untuk bekerja sama diantara intahan itu sendiri dengan organisasi maupun individu di sektor m mengukur indikator kolaborasi ini merujuk pada adanya

kolaborasi dalam kinerja pemerintah, hal ini bertujuan untuk melihat apakah badan publik melakukan kolaborasi terbuka dengan berbagi data atau proses umpan balik, baik antar lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat

Teori yang kemudian digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni teori *Open Government* oleh Wirtz & Birkmeyer (2015: 9). Penggunaan teori ini dikarenakan peneliti merasa teori ini merupakan teori yang relevan terhadap masalah yang di angkat. Teori *open government* yang dikembangkan oleh Wirtz dan Birkmeyer telah menjadi salah satu kerangka kerja yang paling komprehensif dan diakui secara luas dalam studi tentang pemerintahan terbuka. Teori ini menawarkan tiga pilar utama *open government*, yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Ketiga pilar ini memberikan kerangka analisis yang jelas dan terstruktur untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan suatu pemerintahan. Teori ini tidak hanya membahas konsep *open government* secara abstrak, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, berikut gambaran kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mengenai Penerapan *Open Government* dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

Gambar I. 1 Kerangka Berpikir



I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Penerapan *Open Government* dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

I.3.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur dalam bidang administrasi publik mengenai penerapan *open government*. Dengan mengaplikasikan kerangka kerja tiga pilar *open government* yang diusulkan oleh Wirtz dan Birkmeyer pada kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, penelitian ini akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana pendekatan institusional dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan terbuka di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa.

b) Manfaat Praktis

- Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik. Dengan menganalisis secara mendalam kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan *open government*.
- Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan *open government* pada tingkat lokal Kota Makassar.
- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana penerapan *open government* dalam keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.



BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep *open government* dalam konteks keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para informan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan tersebut.

Penelitian kualitatif adalah metode yang memungkinkan untuk menggali dan memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok sosial tertentu, terutama dalam konteks permasalahan sosial atau kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang kaya tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses penelitian bersifat sistematis yang melibatkan perumusan pertanyaan penelitian, perancangan metode pengumpulan data, pengumpulan data dari partisipan, analisis data secara induktif, dan penafsiran hasil penelitian. Laporan akhir pada penelitian ini memiliki struktur yang fleksibel. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini harus memiliki pendekatan yang bersifat induktif, yaitu membangun pemahaman yang lebih luas dari data spesifik yang diperoleh. Fokus penelitian haruslah pada pengalaman individu, dengan tujuan untuk menggali makna dan kompleksitas yang unik dari setiap fenomena (Creswell, 2018).

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian kualitatif dapat disimpulkan sebagai sebuah pendekatan yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia dari perspektif partisipan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran yang akurat, komprehensif, dan mendalam mengenai penerapan *open government* dalam konteks keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan memahami konteks lebih luas yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian



ian

am Semiawan (2010: 37) memperkenalkan lima jenis metode yaitu biografi, fenomenologi, *grounded-theory*, etnografi dan penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus untuk *open government* dalam keterbukaan informasi publik. Fokus

utamanya adalah dapat memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan.

Metode penelitian kualitatif yang memungkinkan untuk menyelami suatu fenomena secara mendalam dengan cara menganalisis secara intensif suatu kasus atau peristiwa tertentu. Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas suatu masalah. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti (Semiawan, 2010: 49).

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus karena dinilai paling tepat untuk mengungkap kompleksitas penerapan *open government*. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan secara acak, melainkan secara purposif. Artinya, pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian yang spesifik, sehingga informan yang dipilih memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian (Subadi, 2006: 63). Informan adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Dengan demikian, mereka dapat memberikan wawasan yang akurat dan mendalam, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih komprehensif. Penelitian ini melibatkan beberapa informan sebagai sumber informasi yang penting, beberapa informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
- 2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
- 3) Masyarakat Pengguna Layanan Informasi

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data



Menurut Patton dalam Semiawan (2010: 110) menyajikan tiga jenis data.

Diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan narasumber *open-ended*. Data yang diperoleh berupa persepsi, dan pengetahuan. Kedua adalah data yang diperoleh melalui observasi (*observation*). Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lokasi, sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan

lain-lain. Ketiga adalah dokumen. Dokumen yang diperoleh berupa material yang tertulis dan yang tersimpan.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan pengamatan secara sistematis dan disengaja terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dan mendalam (Abdussamad, 2021: 147). Menurut Johnson & Christensen, dalam Haryoko, dkk (2020) observasi dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai observasi naturalistik, di mana peneliti mengamati fenomena secara langsung dan alami tanpa adanya manipulasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap data yang lebih autentik. Dengan demikian, observasi merupakan kegiatan melihat dan mencatat apa yang terjadi di lapangan secara langsung.

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melibatkan kehadiran peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati secara mendalam fenomena yang sedang dikaji. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data primer yang bersifat langsung dan aktual, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, catatan, atau sumber informasi lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaktif yang melibatkan peneliti dan partisipan penelitian dalam pertukaran informasi. Melalui tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, peneliti bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pandangan partisipan terkait fenomena yang sedang diteliti (Haryoko, dkk., 2020: 164-165). Wawancara dalam penelitian kualitatif dirancang untuk menggali secara mendalam makna subjektif yang mendasari pemikiran, perasaan, perilaku, dan pengalaman partisipan. Karena itu, Wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif subjektif partisipan secara mendalam, dimana hal tersebut sesuatu yang sulit dicapai hanya dengan melalui observasi saja.

Dengan demikian teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka untuk menggali secara mendalam perspektif informan, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan temuan awal.



mentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang subjek melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen ini dapat berasal dari subjek penelitian sendiri, terkait, atau sumber publik lainnya (Zuchri, 2021: 150). Dokumen

yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus relevan dengan fokus penelitian dan mampu melengkapi data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara atau observasi.

Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang memberikan gambaran tentang situasi setempat. Dengan metode ini peneliti memperoleh data pelengkap yang digunakan untuk mencocokkan beberapa informasi dengan data yang ada di lapangan.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, peneliti akan memasuki tahap analisis data. Dalam tahap ini, peneliti akan mengolah data mentah yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang kompleks. Peneliti akan melakukan pengorganisasian data, pengkodean data, identifikasi tema, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, kategori, dan hubungan yang signifikan dalam data, serta membangun pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang fenomena yang sedang diteliti. Hasil analisis data kemudian akan disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca (Zuchri, 2021: 159). Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31) membagi teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui 3 tahapan analisis yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying concluding*).

Dengan demikian dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan yaitu:

1) Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan teknik analisis yang merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan mengabstrakkan, dan/atau mengubah data yang menjadi bagian keseluruhan dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan lain-lainnya. Kondensasi data dilakukan dengan menyesuaikan data yang dijarah tanpa mengurangi data tersebut. Proses kondensasi data ini dapat menunjang data secara keseluruhan tanpa harus mengurangi temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung (Miles, Huberman, dan Saldana.,



dan demikian peneliti melakukan kondensasi data dengan olah data mentah yang diperoleh dari penelitian, seperti hasil catatan lapangan, atau dokumen, menjadi informasi yang lebih bermakna.

2) Penyajian data

Tahap penyajian data merupakan bagian integral dari proses analisis data yang diberikan Miles dan Huberman. Kegiatan penyajian data dalam analisis kualitatif bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasikan data yang telah dianalisis menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Dengan menyandingkan berbagai kelompok data, peneliti dapat melihat hubungan dan pola, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Haryoko, dkk., 2020: 212). Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya telah diperoleh, data tersebut harus tepat dan akurat, serta memungkinkan peneliti untuk membangun narasi dan meyakinkan tentang fenomena yang sedang diteliti.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang saling berhubungan erat dengan tahap-tahap sebelumnya. Setelah melakukan kondensasi dan penyajian data, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan yang telah diperoleh. Tahapan penarikan kesimpulan adalah proses berpikir kritis di mana peneliti memberikan makna dan arti terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumen.

Pada tahap ini peneliti akan mengintegrasikan semua temuan yang telah diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang fenomena yang diteliti. Peneliti juga melakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa interpretasi yang telah dibuat terhadap data benar-benar akurat dan relevan dengan konteks penelitian.

II.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

1. Uji Validitas

Validasi merupakan langkah krusial dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menguji keabsahan temuan dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Dengan melakukan validasi, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan (Gibbs dalam Creswell, 2018: 314). Dalam penelitian kualitatif, sebuah temuan atau data dianggap valid apabila apa yang dilaporkan oleh peneliti secara akurat merefleksikan realitas yang terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, tidak ada kesenjangan antara data yang dikumpulkan dan interpretasi yang diberikan oleh peneliti.



1, data dianggap valid jika mampu menangkap makna dan
 2) dibangun oleh informan dalam konteks sosial tertentu. Hal ini
 penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari
 objek penelitian.

an ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji
 yang telah dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
 i beberapa sumber. Penelitian kualitatif melakukan strategi

'triangulasi' di antara sumber-sumber data yang berbeda untuk meningkatkan akurasi suatu riset. Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat validitas temuan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan membandingkan data dari berbagai sudut pandang, peneliti dapat meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran temuan yang diperoleh (Haryoko, dkk., 2020: 385).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil yang dihasilkan oleh suatu instrumen penelitian. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang serupa ketika digunakan berulang kali atau pada situasi yang berbeda, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap validitas temuan penelitian. (Sugiyono dalam Haryoko, dkk., 2020: 368).

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran dari instrumen/alat ukur yang memiliki konsistensi hasil yang relatif tidaklah berubah meskipun dilakukan secara berulang pada saat yang lain atau pada situasi yang berbeda (Sugiyono dalam Haryoko, dkk., 2020: 368). Reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melakukan observasi yang sistematis dan mendalam. Peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang budaya dan konteks sosial yang diteliti agar dapat menginterpretasikan data secara akurat.

